

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang merupakan informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan, baik keberhasilan maupun kendala dan solusi pemecahannya serta sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran atas pelaksanaan program kegiatan yang berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja dan peningkatannya dimasa yang akan datang.

Malang, Februari 2018

**Pit. KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MALANG**

(TTD)

Drs. BUDI SUPRIYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590416 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum SKPD	3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	6
A.1. Tujuan	7
A.2. Sasaran	7
A.3. Program dan Kegiatan	7
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	8
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	12
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya	27
A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya	27
A.4. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Renstra Tahun 2014 - 2019	29
A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi	30
A.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja	31
A.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (<i>cost per outcomes</i>)	32
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV : PENUTUP	37
LAMPIRAN :	
1. Matrik Renstra Tahun 2014 - 2019	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	
4. Piagam Penghargaan : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat nilai kategori “ BB ”	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 merupakan laporan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran yang berisi informasi keberhasilan, kendala, solusi, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target 85 %.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.dengan kegiatan :
 - Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.
 - Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan kegiatan :
 - Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah.
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan :
 - Penyusunan dokumen perencanaan
 - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran.

5. Program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan pemerintahan dan monev dengan kegiatan :
- Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan.
 - Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi.
 - Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan.
 - Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana.
6. Program pengembangan data informasi dengan kegiatan :
- Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di kabupaten/kota.

Total Belanja Daerah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 11.686.499.500,00 realisasi sebesar Rp. 10.155.222.623,00 atau 86,90%. Realisasi Kinerja Tahun 2017 sebesar 79,17% dari target 85%, sehingga Capaian Kinerja sebesar 93,14%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan disebut Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Bakorwil III yang berkedudukan di Kota Malang merupakan salah satu dari 5 (lima) lima Bakorwil yang ada di Jawa Timur.

Wilayah Kerja Bakorwil III Malang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota ; Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Sedangkan untuk penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Bakorwil dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya.

Dalam tugas melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, Bakorwil Malang telah mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dan telah diimplementasikan kedalam program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Bakorwil Malang. Keberadaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur mempunyai potensi dan posisi yang strategis dimasing-masing wilayah untuk membantu tugas-tugas Gubernur yang belum atau tidak terjangkau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka mendekatkan pelayanan dan percepatan pelayanan maka Bakorwil Jawa Timur sangat diperlukan.

Perlu kita ketahui bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.687.622 jiwa luas wilayah darat 47.157,71 KM² luas laut 110.000 KM², 229 pulau besar dan kecil serta sosial budaya yang beraneka ragam sehingga diperlukan span of control yang

memadai. Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan hasil koordinasi dan kerjasama menjadi kebutuhan pemerintah provinsi yang dalam hal ini pelaksanaan tugas-tugas koordinasi telah dilaksanakan oleh Bakorwil Jawa Timur.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana akan dilimpahkannya beberapa kewenangan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi menjadikan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur layak didukung oleh sumber daya sosial dan SDM yang memadai guna menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di daerah.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang antara lain :

- 1 Potensi konflik antar daerah dalam hal batas wilayah daerah.
- 2 Kewenangan organisasi terhadap pemerintah kabupaten/kota.
- 3 Sinergitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya sosial antara provinsi dan kabupaten/kota.
- 4 Perlunya lembaga yang berfungsi untuk mendorong, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

D. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya.

2. Tugas

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- d. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- f. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- i. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang adalah sebagai berikut :

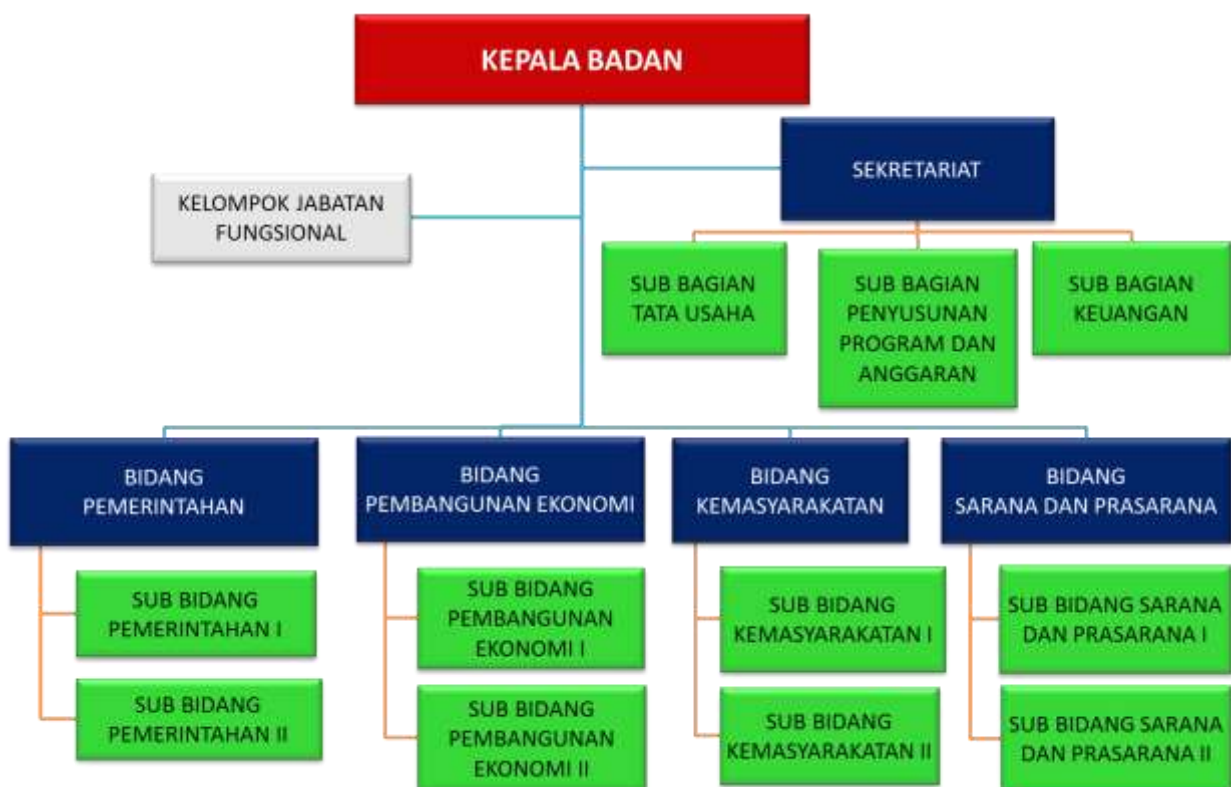
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan I.
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan II.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I.
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.
- e. Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kemasyarakatan I.
 - 2) Sub Bidang Kemasyarakatan II.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana I.
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana II.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang selengkapnya sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BAKORWIL MALANG



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban instansi sebagai pelaksana tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi tugas yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja tersebut oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang telah diuraikan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 disusun sesuai dengan sasaran strategis organisasi yaitu Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dengan indikator kinerja “ **Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti** ” dengan target 85%.

Adapun pengukuran capaian kinerja yang dipergunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan apa yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang merupakan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi organisasi dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana yang disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

Sasaran : Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

Tabel 3.2
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	85 %	79,17 %	93,14 %

Sebagaimana yang diuraikan pada tabel Pencapaian Kinerja tersebut diatas dan mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang target 85% realisasi 79,27% maka capaian kinerjanya 93,24%, dalam kategori **Baik**.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 merupakan akumulasi dari hasil capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang menghasilkan kinerja perubahan positif organisasi. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang pada Tahun 2017 telah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghasilkan 24 rekomendasi. Sedangkan rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi, sehingga hasil pengukuran kinerja tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
PENJABARAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

URAIAN	JUMLAH	Capaian (%)
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	19 Rekomendasi	93,14%
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	24 Rekomendasi	

Perhitungan :

- Realisasi Kinerja = $(19 / 24) \times 100\% = 79,17\%$
- Target Kinerja = 85%
- Capaian Kinerja = $(79,17 / 85) \times 100\% = \mathbf{93,14\%}$

Sebagaimana uraian perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut diatas, bahwa dari total rekomendasi hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebanyak 24 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil koordinasi yang mendapat disposisi tindaklanjut dari Bapak Gubernur Jawa Timur. Adapun rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 19 (sembilan belas) rekomendasi meliputi kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
KEGIATAN DAN REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a) Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Bakorwil Malang akan mengikutkan maksimal 2 (dua) unit pelayanan/inovasi dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. b) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota menganggarkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik sebagai penerapan kebijakan Satu Lembaga Satu Inovasi.
2	Monitoring dan Evaluasi Peran Kelompok Informasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Bakorwil Malang akan segera menetapkan 2 (dua) Kelompok Seni Pertura Kabupaten/Kota yang akan tampil pada Pekan KIM ke-IX Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. b) Pemberdayaan Forum KIM Provinsi Jawa Timur dengan SK agar lebih diberdayakan, dengan tidak sekedar SK Kepala Dinas Kominfo Provinsi, melainkan dengan SK Gubernur Jatim. c) Forum KIM Provinsi Jawa Timur difasilitasi dan diberikan ruang pada pelaksanaan Pekan KIM ke-IX Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
3	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> I. Kewenangan Desa <ul style="list-style-type: none"> a) Pemerintah Kabupaten/Kota diminta menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal skala Desa, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. b) Pemerintah Desa diminta menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. c) Paling lambat Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sudah ditetapkan paling lambat bulan November 2017.

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		<p>II. Administrasi Desa</p> <p>a) Kabupaten/Kota menindaklanjuti Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa dengan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi dan fasilitasi tentang administrasi desa.</p> <p>b) Kabupaten/Kota segera melakukan sosialisasi tentang Administrasi Desa karena ada beberapa perubahan buku Adminstrasi Desa.</p> <p>c) 3 Kabupaten/Kota hendaknya mengkoordinir pengadaan buku-buku administrasi desa untuk standarisasi.</p>
4	Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA)	<p>a) Tahun Depan adalah tahun Politik, para Narasumber dan pada Unsur FORPIMDA Kabupaten/Kota se Wilker Baperwil Malang sepakat untuk menjaga kondusifitas masing- masing daerah jangan sampai ada kegaduhan dan turut mensukseskan PILKADA serentak 2018.</p> <p>b) Wawasan Kebangsaan dan bela negara sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan dalam bingkai kebhinekaan NKRI, karena adanya degradasi terhadap pemahaman Pancasila akibat kemajuan global.</p> <p>c) Bahaya Narkoba juga didinggung oleh narasumber, kerugian negara akibat narkoba ditaksir hingga Rp. 63Triliun, dan setiap hari diperkirakan 5 orang meninggal akibat narkoba, bahkan sudah menjalar para pelajar ditingkat sekolah dasar.</p> <p>d) Dana Desa juga menjadi sorotan dalam kegiatan dimaksud, diharapkan Babinkamtibmas juga turut mengawasi dan ikut pendampingan agar dana desa tepat sasaran.</p> <p>e) Revolusi Mental perlu ditindaklanjuti dengan mengembalikan roh pendidikan budipekerti dalm kurikulum pendidikan disekolah.</p> <p>f) Permasalahan yang terjadi lintas daerah perlu ditangani secara bersama-sama, sehingga forum silaturahmi unsur FORPIMDA perlu dilaksanakan secara kontinyu.</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
5	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Mitigasi Bencana Alam	<p>a) Pemerintah daerah mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan baik melalui penyuluhan, sosialisasi, kampanye serta fasilitasi masyarakat.</p> <p>b) Melakukan antisipasi dengan menggerakkan jajaran teknis sampai tingkat desa dan mengaktifkan pengawasan terhadap setiap indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>c) Meningkatkan koordinasi antara pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, TNI/POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan Masyarakat dalam upaya pengendalian.</p> <p>d) Menggerakkan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota hingga Instansi pada level dibawahnya.</p> <p>e) Melakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>f) Pembangunan sumur bor dan embung pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>g) Memastikan semua sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pemadaman dalam kondisi siap pakai.</p> <p>h) Menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari APBD sesuai dengan dukungan kebijakan pada Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang penggunaan dana APBN.</p>
6	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu	<p>a) Adanya sinergitas data pemilih yang valid, banyak permasalahan muncul karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) kurang akurat.</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan akan melakukan pengadaan mesin pembuatan KTP elektronik karena usia mesin cetak sudah lebih 5 (lima) tahun sehingga prosesnya lambat.</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		<p>c) Data kependudukan merupakan salah satu komponen utama dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019, diharapkan Kabupaten/Kota untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana terkait penerbitan identitas penduduk, baik KTP elektronik maupun surat keterangan kependudukan.</p>
7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis	<p>Guna Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi disarankan untuk dilakukan keterpaduan antara OPD terkait dalam mendukung pengembangan usaha agribisnis yaitu :</p> <p>a) Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan anggaran dan terus menerus mendorong penerapan GAP agar dapat menghasilkan produk sesuai tuntutan perdagangan global.</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata berbasis agribisnis perlu melakukan koordinasi untuk menyusun konsep pengembangan yang terintegrasi dan terkolaborasi dengan baik.</p> <p>c) Pemerintah Kabupaten/Kota agar menjalin kerjasama dengan pasar, guna meningkatkan akses pemasaran dan meningkatkan jumlah penjualan produk pertanian di daerah.</p>
8	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sentra Produksi Perikanan	<p>a) Dilakukan penanganan secara terpadu, baik melalui pembentukan sentra-sentra produksi perikanan maupun pengembangan kawasan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan perikanan di pedesaan .</p> <p>b) Bakorwil Malang segera memetakan daerah sentra produksi perikanan baik yang berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap pengelolaan hasil perikanan, maupun pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis masyarakat local.</p> <p>c) Pengadaan pelatihan pemberdayaan masyarakat pelaku kegiatan produksi perikanan.</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		<p>d) Penerapan prinsip Higiene dalam industri mulai dari pengadaan bahan mentah hingga menjadi produk yang dikonsumsi.</p> <p>e) Perlunya Sanitasi dalam industri perikanan karena ikan merupakan komoditas yang mudah mengalami kerusakan (perishable food).</p>
9	Sinergitas, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Cagar Biosfir	<p>a) Cagar Biosfir harus dikelola secara berkelanjutan dan berkesinambungan.</p> <p>b) Perlu adanya partisipasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengelola Kawasan Hutan, Perguruan Tinggi, Masyarakat/Kelompok Masyarakat.</p> <p>c) Cara pandang Masyarakat/Paradigma Baru.</p> <p>d) Pengembangan Pariwisata.</p> <p>e) Pengembangan Produksi, Industri (UMKM) baik mengenai kualitas maupun kuantitas.</p> <p>f) Pengelolaan sampah secara profesional.</p>
10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Koperasi	<p>a) Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur bersedia memberikan pendampingan merevitalisasi Kopontren.</p> <p>b) Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur telah memberikan dana hibah sebesar 25.000.000,- kepada 100 kopontren yang sudah mandiri.</p>
11	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pasar Rakyat	<p>a) Perlunya usulan revitalisasi pasar melalui Program Paket Revitalisasi DAK dan Sarana Pembantuan seperti yang telah diterima Kab Malang dimana sudah dilaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar pakis) dengan APBN 2017. Masih ada kurang lebih 262 Pasar Rakyat di wilayah Bakorwil Malang yang perlu revitalisasi.</p> <p>b) Perlunya perbaikan sarana prasarana, perbaikan sistem manajemen pengelolaan pasar, serta peningkatan SDM pengelola pasar dengan mengikuti bimbingan dan pelatihan.</p> <p>c) Seperti Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perdagangan telah melakukan terobosan yang baik dalam perbaikan sarana prasarana, sistem manajemen pengelolaan pasar, dan penataan pedagang, serta kebersihan. Misalnya pada Pasar</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		<p>Oro-oro dowo Kota Malang yang saat ini telah menjadi rujukan dan percontohan bagi Kab/Kota dan akan terus berupaya untuk dapat meraih predikat dari pasar sehat menuju pasar SNI.</p> <p>d) Harapannya pasar rakyat dapat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Untuk tetap dapat mempertahankan keeksisan pasar rakyat, perlu diadakan kegiatan sebagai daya tarik masyarakat dengan slogan “Ayo kembali ke Pasar Rakyat”.</p>
12	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan	<p>a) Melalui program jalin matra dengan tujuan mencari cara agar masyarakat miskin dapat mandiri dalam upaya pemberdayaan peningkatan kesejahteraan</p> <p>b) Stakeholder/Instansi terkait melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tergolong miskin untuk mengetahui permasalahan yang dialami dan menampung serta memberikan solusinya</p> <p>c) Harus ada kesepakatan verifikasi data tunggal dalam penanganan penanggulangan kemiskinan dalam rangka tepat sasaran penerima bantuan dengan kriteria sebagai penduduk miskin</p> <p>d) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup dan penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan dan pedesaan</p> <p>e) Melibatkan pihak swasta yang mempunyai kepentingan pembangunan fisik agar mempunyai kepedulian terhadap penduduk miskin di sekitarnya diberikan bantuan.</p>
13	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pendidikan SMA dan SMK	<p>a) Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memperhatikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar memadai..</p> <p>b) Pemerintah harus membuat penelitian yang benar-benar bisa berguna dan bermanfaat sehingga dapat diterapkan pada sistem pendidikan, agar kedepan bisa lebih baik.</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		c) Agar sistem pendidikan dari SMA/SMK menghasilkan lulusan yang dicari pekerjaan bukan lulusan yang mencari pekerjaan sehingga terciptanya lulusan yang mandiri.
14	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial	<p>a) Kepada Pemerintah Kab/Kota agar mengaktifkan kembali pekerja sosial kecamatan (PSK) untuk melakukan pendampingan serta memberikan up date data sebagai tindak lanjut bagi penderita ODGJ.</p> <p>b) Diharapkan ada tindak lanjut dari rapat ini sebagai evaluasi bagi Tim Penanggulangan kesehatan jiwa Masyarakat (TPKJM) untuk segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut.</p> <p>c) Kepada pemerintah kab/kota untuk mendirikan shelter sebagai tempat pasca perawatan medis dari rumah sakit jiwa dan persiapan pulang kembali ke rumah/keluarga.</p> <p>d) Bagi pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif) pemerintah kab/kota diharapkan ada perencanaan sebagai bentuk dukungan anggaran untuk penguatan pemberdayaan bagi keluarga penderita ODGJ yang rata-rata rentan ekonominya/tidak mampu</p>
15	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan FKUB	<p>a) Banyaknya konflik umat seagama yang disebabkan munculnya faham baru yang berbenturan dengan faham yang sudah ada sebelumnya, perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Seagama di masing-masing Kab/Kota se Jawa Timur guna meredam terjadinya konflik umat seagama.</p> <p>b) Diharapkan pimpinan daerah memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan FKUB yang ada di masing-masing Kab/Kota agar FKUB dapat berperan dan berdaya secara optimal.</p> <p>c) Diperlukan peningkatan anggaran bagi FKUB agar dapat mengcover semua kegiatan yang ada karena FKUB sebagai garda paling depan (fasilitator) bila terjadi konflik SARA dalam masyarakat.</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
16	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kerjasama Destinasi Wisata	<p>a) Menyatukan pandangan bagi stakeholder pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata terhadap pentingnya pariwisata dalam konteks pembangunan daerah</p> <p>b) Kab/kota menyusun perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, strategi pemasaran pariwisata dan membangun Badan Promosi Pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dan pencitraan (branding) destinasi pariwisata didaerahnya masing-masing</p> <p>c) Kab/Kota mampu mengembangkan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata melalui dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.</p>
17	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	<p>a) Sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahu 2011 tentang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) maka bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki BNNK perlu dibentuk Tim Koordinasi terpadu P4GN.</p> <p>b) Semua Perangkat Daerah Lembaga / Instansi di Wilayah Kerja Bakorwil Malang harus berperan aktif dalam P4GN.</p> <p>c) Perlu dukungan alokasi anggaran yang mencukupi.</p>
18	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>a) Agar pengelolaan dan pengawasan limbah domestik dapat dilakukan secara efektif, dimohon pemerintah kab/kota melaksanakan pendataan sumber-sumber limbah domestik diluar perumahan di Kab/Kota masing-masing</p> <p>b) Karena jumlah wisatawannya semakin meningkat demikian juga sampah yang ditinggalkan wisatawan semakin banyak di area destinasi wisata Batu, Pantais elatan, dan bromo tengger semeru, maka dimohon pemerintah provinsi jawa timur dapat menghimbau/mendorong beberapa kab/kota untuk penanganan sampah di area wisata tersebut</p>

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
		<p>c) Mengingat sumber mata air semakin langka dan perlu jaga kelestariannya, dimohon pemerintah provinsi jawa timur dapat menghimbau/mendorong pemanfaatan sumber mata air bagi beberapa kab/kota.</p> <p>d) Dimohon pemerintah provinsi jawa timur dapat membangun insenerator berstandar internasional dengan kapasitas yang mampu menampung limbah medis dari seluruh jawa timur, dan dimohon juga untuk membangun tempat pembuangan sampah regional yang melayani beberapa kab/kota karena produksi sampah semakin meningkat.</p>
19	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)	<p>a) Penyusunan <i>Readines Criteria</i> antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menentukan Titik Pertemuan Jalan Lintas Selatan (JLS).</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi aktif dengan Kementerian Pekerjaan Umum Pusat dan Perhutani.</p> <p>c) Sosialisasi kepada masyarakat tarkait lahan yang sudah dibebaskan.</p>

Dalam rangka menyajikan laporan kinerja yang lebih informatif dan obyektif atas pelaksanaan program kegiatan yang berupa koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, maka perlu diinformasikan pula beberapa Rekomendasi Hasil kegiatan atau koordinasi yang masih belum ditindaklanjuti yaitu Rekomendasi dari kegiatan sebagai berikut :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pasar Desa.
- 3) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-MUSRENBANG).
- 5) Sinkronisasi Penanganan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang diuraikan pada laporan kinerja ini adalah permasalahan dan solusi hasil rapat koordinasi sesuai dengan permasalahan dan solusi masing-masing bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan ekonomi, bidang kemasyarakatan, bidang sarana dan prasarana.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

Tabel 3.5
PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG PEMERINTAHAN

PERMASALAHAN	SOLUSI
Terkait Gelar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Bakorwil se Jawa Timur di daulat untuk berpartisipasi.	Kepada Panitia Anggaran Provinsi Jawa Timur agar Bakorwil Se Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Gelar Pelayanan Publik
Di wilayah kerja Bakorwil Malang masih banyak kelompok KIM yang menggunakan <i>blog product asing (dot com)</i> .	Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi terhadap KIM yang akan mengganti <i>blog product</i> lokal atau produk dalam negeri (<i>dot go dot id</i>).
Implementasi peraturan tentang Desa pada masing-masing kementerian berbeda-beda.	Perlu sinkronisasi regulasi dari masing-masing kementerian agar pelaksanaan pelaporan/SPJ tidak bermacam-macam versi.
Seringnya terjadi mutasi pejabat, sehingga data-data FORPIMDA Kabupaten/Kota tidak valid (berubah-ubah).	Perlu adanya pemberitahuan dari Kabupaten/Kota terhadap Pejabat FORPIMDA yang mengalami mutasi jabatan.
Bakorwil tidak memiliki logistik Bencana Alam.	BPBD Provinsi Jawa Timur akan menaruh logistik bencana alam di bakorwil.
Pelaksanaan e-KTP belum tuntas, karena banyaknya pemilih pemula.	Inventarisasi pemilih pemula ke SMA/SMK.

Tabel 3.6

PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi informasi pasar dan permodalan. - Tuntutan Global dalam pemenuhan kebutuhan produk pertanian dengan penyediaan produksi pertanian yang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi teknis memberikan pembinaan berkesinambungan mengenai teknis penanaman, pemupukan sampai pemasaran hasil melalui Teknologi Informasi. - Mendorong produsen/petani dalam budidaya yang baik yang mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, sistem agribisnis dari hulu ke hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk agar sesuai dengan permintaan pasar.
<p>Belum maksimalnya peran koperasi dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya yang dimiliki anggota.</p>	<p>Mendorong penguatan kelembagaan koperasi melalui pemberdayaan SDM.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan. - Belum terpetakannya daerah sentra produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya penangan secara terpadu melalui pembentukan sentra produksi perikanan dan pengembangan kawasan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur perikanan di pedesaan. - Mengoptimalkan program kerja yang mendukung percepatan pengembangan sentra - sentra perikanan.
<p>Belum digunakannya label cagar biosfir (pariwisata, produk hutan dan industri UMKM) agar dikenali di pasar global.</p>	<p>Menyusun standarisasi produk pelabelan cagar biosfir.</p>
<p>Perbandingan luas bangunan dengan jumlah pedagang dalam pasar rakyat/tradisional tidak seimbang, kebersihan tidak terjaga serta meningkatnya pertumbuhan pasar modern.</p>	<p>Mempertahankan eksistensi pasar rakyat/tradisional dengan memperbaiki sarana prasarana, sistem manajemen pengelolaan, peningkatan SDM pengelola pasar serta mengatur pertumbuhan pasar modern.</p>

Tabel 3.7
PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG KEMASYARAKATAN

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas beras rastra sangat tidak layak untuk dikonsumsi. - Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menjalankan Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai masih belum optimal dikarenakan kurangnya monitoring/pemantauan ke lokasi. - Data keluarga penerima manfaat program rastra kurang valid. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bulog diharapkan meningkatkan kualitas beras. - Menjalin komunikasi/kerjasama yang sinergis antar stake holder (instansi pemerintah, bulog, TKPKD dan pelaksana distribusi) dalam pelaksanaan Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai . - <i>Updating</i> data keluarga penerima manfaat program rastra sehingga tercapai target 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat administrasi).
<p>Pengembalian Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak sepenuhnya dapat diterima oleh warga/keluarga.</p>	<p>Mengoptimalkan fungsi Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dalam melakukan Pendampingan kepada warga/keluarga agar mau menerima dan mendukung ODGJ kembali ke lingkungannya.</p>
<p>Peningkatan jumlah wisatawan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, aksesibilitas dan infrastruktur wisata alam yang belum digarap secara maksimal.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten / Kota membangun dan mengembangkan destinasi wisata, pelayanan, infastruktur maupun faktor pendukung lainnya dalam mengembangkan potensi wisata di wilayahnya, sehingga target 1 juta wisatawan mancanegara di Jawa Timur bisa tercapai.</p>
<p>Disintegrasi bangsa akibat penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) tentang isu sara.</p>	<p>Memperkuat peran Forum Kerukunan Umasat Beragama (FKUB) sebagai garda paling depan / fasilitator apabila terjadi konflik sara di masyarakat.</p>

Tabel 3.8

PERMASALAHAN DAN SOLUSI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya penanganan dan pengelolaan limbah domestik dan limbah medis. - Kelangkaan sumber mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan tempat pembuangan sampah regional dan <i>Insenerator</i> berstandar internasional untuk menampung limbah domestik dan limbah medis di Jawa Timur. - Pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber mata air.
<p>Masih terdapat aset Provinsi di wilayah kerja Bakorwil Malang yang belum jelas penggunaannya/perikatannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemantauan dan pengawasan serta menginventarisir permasalahan aset provinsi yang ada di daerah. - Merumuskan penyelesaian masalah aset di daerah sesuai jenis permasalahannya agar di tindaklanjuti oleh SKPD terkait (Tim Aset Provinsi Jawa Timur).

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2017	Th. 2017
Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	80%	85%	83,33%	79,17%

Realisasi Kinerja Tahun 2016 sebesar 83,33% dari target 80% dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sebesar 79,17% dari target 85% yang maka ada penurunan realisasi kinerja sebesar **4,16%**.

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

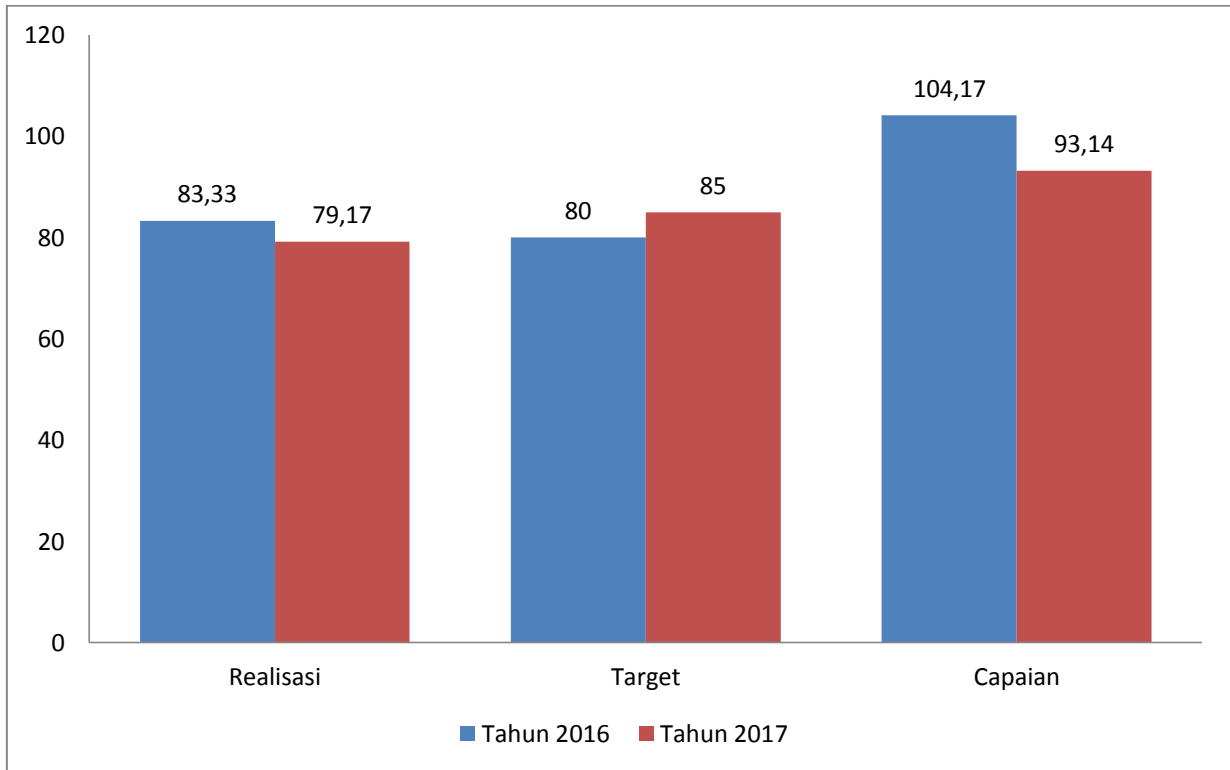
Realisasi Kinerja Tahun 2016 sebesar 83,33% dari target 80% yang berarti capaian kinerja tahun 2016 sebesar **104,17%** dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sebesar 79,17% dari target 85% yang berarti capaian kinerja tahun 2017 sebesar **93,14%** maka ada penurunan capaian kinerja sebesar **11,03%**.

Tabel 3.10
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Th. 2016	Th. 2017
Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	104,17%	93,14%

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja juga terlihat seperti pada diagram balok berikut :

Diagram 3.1
DIAGRAM PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA



Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas menunjukkan kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dari tahun ke tahun ada sedikit penurunan, hal ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Bidang disebabkan antara lain menurunnya jumlah bencana alam di wilayah kerja Bakorwil Malang, jumlah BUMdes dan Pasar Rakyat tidak maksimal serta kegiatan Musrenbang tingkat Bakorwil sudah tidak ada (terpusat di Provinsi).

A.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan Target Kinerja Renstra Tahun 2014 - 2019

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan target RENSTRA Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2014 - 2019 dapat dijelaskan bahwa tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2014 - 2019 dengan sasaran Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang. Indikator kinerja yang dipergunakan dalam sasaran tersebut adalah Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 85 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d. AKHIR PERIODE RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (Th. 2019)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	79,17%	83,34%

Realisasi Kinerja tahun 2017 sebesar 79,17% dari target 85% itu berarti menunjukkan bahwa capaian kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 sebesar 93,14%. Capaian kinerja tersebut pengukurannya berasal dari Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pengukuran kinerja diatas.

Laporan Kinerja Kinerja Tahun 2017 menguraikan realisasi kinerja tahun 2017 dengan membandingkan target Renstra 2014 - 2019. Realisasi kinerja pada tahun ketiga Renstra yaitu tahun 2017 sebesar 79,17% dengan target kinerja akhir Renstra Tahun 2014 - 2019 sebesar 95% maka tingkat kemajuan kinerja sebesar **83,34%**.

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Tahun 2017 adalah Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 85%. Dari target tersebut realisasi 79,17% dengan capaian kinerja sebesar 93,14%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang atau oleh SKPD terkait.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa sasaran strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang adalah “Meningkatnya hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang” didukung oleh 2 (dua) program pembangunan yaitu Program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan Program pengembangan data informasi.

Program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut penjabaran dari pelaksanaan RENSTRA, RENJA atau RKT yang saling terkait dan sinergis serta komitmen dan konsistensi pelaksanaan Perjanjian Kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan staf.

Penyebab keberhasilan pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas SKPD.
- Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota.
- Sasaran program kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.
- Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau SKPD terkait dan masyarakat.

Penyebab kegagalan pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Program kegiatan yang dilaksanakan bukan program kegiatan prioritas kabupaten/kota atau SKPD terkait.
- Program kegiatan yang dilaksanakan tidak sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota.
- Manfaat program kegiatan tidak dirasakan oleh daerah atau SKPD terkait dan masyarakat.

- Program kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
Solusi yang dilakukan antara lain :
- Melakukan evaluasi program kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sampai dengan selesainya kegiatan.
- Meningkatkan persiapan pelaksanaan program kegiatan (SDM pelaksana program, anggaran, dan waktu yang cukup).
- Meningkatkan sinergitas program kegiatan pemerintah provinsi/Bakorwil Malang dengan kabupaten/kota serta data pendukung yang valid.
- Publikasi kordinasi dan isu strategis aktual yang dikoordinasikan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

A.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang tahun 2017 didukung oleh perencanaan program kegiatan yang memadai, mulai dari program jangka menengah (RENSTRA-SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RENJA/RKT) dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dari pimpinan sampai dengan staf.

Terkait dengan program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, dapat dijelaskan bahwa pada masing-masing program kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis SKPD dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Keselarasan sasaran strategis, indikator kinerja dalam RENSTRA, RENJA, RKA/DPA dan Perjanjian Kinerja akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, demikian halnya sebaliknya jika ada ketidak sesuaian sasaran satategis dan indikator kinerja pada masing-masing dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja akan berdampak pada gagalnya sebuah pelaksanaan program kegiatan karena tidak memiliki acuan dan indikator yang jelas, baik ouput maupun outcome yang diharapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang telah melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, evaluasi eksternal dan internal terutama evaluasi internal terkait program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan bersama-sama sesuai bidang masing-masing, sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun kegagalan dan solusi yang diperlukan secara obyektif dan transparan. Selain

itu keberhasilan pelaksanaan program kegiatan tersebut ditunjang oleh meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM yang dimiliki SKPD (keikutsertaan diklat struktural dan fungsional), inovasi program kegiatan yang semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh daerah atau masyarakat, terintegrasinya perencanaan program kegiatan SKPD dalam mendukung visi misi SKPD, pengawasan dan pengendalian program kegiatan yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik, sedangkan beberapa kegagalan pelaksanaan program kegiatan lebih pada komitmen SKPD terkait dalam menindaklanjuti hasil koordinasi antara lain : Program kegiatan yang dilaksanakan bukan program kegiatan prioritas kabupaten/kota atau SKPD terkait, Program kegiatan yang dilaksanakan tidak sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota, Manfaat program kegiatan tidak dirasakan oleh daerah atau SKPD terkait dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimana pada tahun 2017 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Malang sesuai target RENSTRA dan RENJA sebesar 85% realisasi 79,17% dengan capaian kinerja sebesar 93,14% predikat **baik**.

A7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Cost Per Outcomes*)

Keterbatasan anggaran dan kewenangan (Tupoksi SKPD) tidak menyurutkan semangat dan capaian kinerja SKPD. Dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, kami telah mengoptimalkan potensi yang dimiliki, yaitu :

- Aspek Manajemen : Sebagai antisipasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diperlukan kajian akademis untuk menyesuaikan tupoksi SKPD yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 134 Tahun 2016.
- Aspek Sumber Daya manusia : Keterbatasan jumlah personil dan kualitas SDM yang belum memadai terkadang menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.

- Jumlah pegawai hanya 44 orang sedangkan sesuai analisis jabatan yang diperlukan di Bakorwil Malang untuk mengisi jabatan fungsional Umum dan jabatan tertentu lainnya diperlukan 76 orang, sehingga masih kurang 32 orang.
- Aspek Sarana dan Prasarana : Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun pemeliharannya harus dipenuhi.
- Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran : Untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran SKPD, Bakorwil Malang hanya didukung oleh 4 program rutin (7 kegiatan) dan 2 program pembangunan (6 kegiatan).
- Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program kegiatan baik rutin maupun pembangunan dan tugas-tugas dari Bpk. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

Tabel 3.12
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Rp. 1.211.525.000	22,58%

Sebagaimana yang diuraikan pada tabel diatas bahwa sasaran strategis pada Renstra Bakorwil Malang Tahun 2014 - 2019 yaitu Meningkatkan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang. Sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) program dengan anggaran sebesar Rp. 1.211.525.000,00 dari total anggaran Belanja Langsung (Ex Rutin dan Pembangunan) sebesar Rp. 5.365.625.000,00 maka anggaran berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan tahun 2017 sebesar Rp. 1.046.692.000,00 atau 22,58%.

Tabel 3.13
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	79,17%	93,14%	1.211.525.000	1.040.744.930	85,90%
Program 1.1 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan					1.071.475.000	901.887.604	84,17%
Program 1.2 Program Pengembangan Data Informasi					140.050.000	138.857.326	99,15%

Pencapaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa seberapa besar Bakorwil Malang dapat merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra SKPD, dimana dalam target kinerja tahun 2017 sebesar 85% realisasi 79,17% yang berarti capaian kinerja Bakorwil Malang tahun 2017 sebesar 93,14%. Sedangkan realisasi anggarannya dari alokasi sebesar Rp. 1.211.525.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.040.744.930,00 atau 85,90%. Perbandingan tersebut menunjukkan walaupun realisasi anggaran sebesar 85,90% akan tetapi realisasi target kinerja mencapai 93,14% yang berarti capaian kinerja Bakorwil Malang melebihi realisasi anggaran. Capaian kinerja tersebut ada efisiensi anggaran sebesar 7,24% sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 14
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	93,14	85,90	7,24 %

B. Realisasi Anggaran

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Malang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil Malang tahun 2017 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.15
PAGU DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		(Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.320.874.500	5.285.568.783	83,92%
- Belanja Gaji dan Tunjangan	3.396.549.000	2.686.596.583	79,10%
- Tambahan Penghasilan PNS	2.922.638.000	2.597.284.700	88,87%
- Insentif Pemungutan Restribusi	1.687.500	1.620.000	100%
BELANJA LANGSUNG	5.365.625.000	4.869.653.840	90,76%
- Belanja Pegawai	822.815.000	696.960.000	84,70%
- Belanja Barang dan Jasa	3.895.462.000	3.547.398.144	91,06%
- Belanja Modal	647.348.000	625.295.696	96,59%
TOTAL BELANJA DAERAH	11.686.499.500	10.155.222.623	86,90%

Tabel 3.16

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	805.242.800	667.786.619	82,93
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	805.242.800	667.786.619	82,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.104.898.200	1.941.691.010	92,25
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.064.098.200	980.000.934	92,10
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.040.800.000	961.690.076	92,40
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.206.499.000	1.182.159.081	97,98
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	949.159.000	945.968.136	99,66
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.340.000	236.190.945	91,78
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	37.460.000	37.272.200	99,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.000.000	9.892.250	98,92
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	27.460.000	27.379.950	99,71
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1.071.475.000	901.887.604	84,17
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	332.278.000	293.657.978	88,38
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	280.000.000	201.828.196	72,08
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Masyarakat	280.000.000	247.030.654	88,23
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	179.197.000	159.370.776	88,94
Program pengembangan Data Informasi	140.050.000	138.857.326	99,15
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	105.050.000	103.969.926	98,97
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota.	35.000.000	34.887.400	99,68
TOTAL :	5.365.625.000	4.869.653.840	90,76